

**PENERAPAN PENGATURAN LABEL PANGAN YANG BERKAITAN  
DENGAN KANDUNGAN GULA  
(STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA & SINGAPURA)**

Vani Meilani<sup>1</sup>, Wahyu Adi Mudiparwanto<sup>2</sup>

**INTISARI**

Salah satu langkah penting dalam upaya melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat adalah melalui penerapan pelabelan informasi pangan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang komposisi atau informasi penting lain yang terkandung dalam pangan. Hal ini memungkinkan konsumen dapat menentukan pilihan lebih sehat sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya mengenai informasi kandungan gula mengingat tingginya prevalensi penyakit tidak menular yang terjadi saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pengaturan label pangan terkait informasi kandungan gula dan meninjau juga kebijakan pelabelan dari lintas negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sementara itu, jenis penelitian menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum informasi kandungan gula dicantumkan dalam Informasi Nilai Gizi, pencantuman informasi tersebut bersifat wajib. Hal ini dipertegas dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan Pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, namun dalam penerapannya masih belum sepenuhnya efektif karena tingkat kepatuhan pelaku usaha masih kurang. Singapura telah membuat kebijakan tentang skema pemeringkatan label nutrisi kandungan gula untuk minuman, sementara itu Indonesia belum memiliki skema penilaian sejenis.

Mengingat meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, pelabelan pangan di Indonesia membutuhkan inovasi dalam penggunaan format label pangan. Pemerintah dapat merancang peraturan baru atau mereformasi peraturan dengan memperhatikan substansi yang strategis dan transparan guna mendorong penerapan pelabelan pangan yang efektif.

**Kata Kunci:** Label Pangan, Kandungan Gula, Hak Konsumen, Perbandingan Hukum

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**THE IMPLEMENTATION OF FOOD LABELLING RAGULATIONS**  
**RELATING TO SUGAR CONTENT**  
**(COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND SINGAPORE)**

Vani Meilani<sup>1</sup>, Wahyu Adi Mudiparwanto<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*One of the crucial steps in the effort to protect and improve public health is through the implementation of food labeling information. This measure aims to provide clear and accurate information on the composition and other significant detail information contained in food. This enables the public or consumers to make healthier choices according to their needs. Particularly regarding sugar content information, given the high prevalence of non-communicable diseases currently.*

*This research is a normative-empirical legal research, which aims to examine how the implementation of food labeling regulations related to sugar content information and also examine labeling policies from across countries. The methods used in this research are legislative approach and comparative approach. Additionally, the type of research uses primary data obtained from interviews and secondary data form literature reviews. The data analysis technique employed is qualitative, presented descriptively.*

*The results of this study can be concluded that the regulation of food labeling related to sugar content information has been mandated as stipulated in the Minister of Health Regulation No. 30 of 2013 regarding the Inclusion of Information on Sugar, Salt and Fat Content and Health Messages on Processed Food and Ready-to-eat Food. Generally, this information is included in the Nutritional Fact Label. Although regulations have been established, implementation is still not fully effective due to lack of compliance from businesses. Singapore has established a policy on a sugar content nutrition label rating scheme for beverages, whereas Indonesia has yet to develop a similar rating scheme.*

*Given the increasing prevalence of non-communicable diseases, food labeling in Indonesia requires innovation in the use of food label formats. The Indonesian government could design new regulations or reform existing regulations, considering strategic and transparent substance to promote effective implementation of food labeling.*

**Keywords:** Food Labeling, Sugar Content, Consumer Rights, Legal Comparison

---

<sup>1</sup> Student of Law Study Program (Bachelor Degree), Jenderal Achmad Yani University of Yogyakarta

<sup>2</sup> Lecturer of Law Study Program, Jenderal Achmad Yani University of Yogyakarta